

NOTULENSI RAPAT
PEMBAHASAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BAINTELKAM POLRI

I. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Agustus 2026
Tempat : Ruang Rapat Ditjen PSP Gedung D Lt. 8
Waktu : 10.00 s/d selesai

II. Pimpinan Rapat

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian

III. Peserta Rapat

1. Kepala Bidang Kerja Sama Baintelkam Polri
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Direktur Pupuk
4. Tim Sub Bidang Kerjasama Dalam Negeri
5. Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

IV. Pendahuluan

1. PKS diarahkan untuk pencegahan & perbaikan sistem (bukan penindakan semata) dan harus implementatif,

V. Pembahasan

1. Penyusunan RDKK dan Penebusan Pupuk
2. Banyak kasus berujung panggilan aparat; penyuluh lapangan paling sering terdampak
3. Kelemahan data RDKK (petani penggarap lintas desa bisa terakumulasi melebihi batas tanpa terdeteksi)
4. Ditemukan idnikasi pupuk palsu/pengalihan pupuk asli

VI. Opsi Solusi

1. “Satu karung, satu identitas” (barcode)
2. Validasi data penerima (RDKK) berbasis titik koordinat lahan; usulan pembiayaan sebagai komponen mandatori dalam skema subsidi (APBN).
3. Pemetaan daerah rawan berbasis data kasus/panggilan sejak 2020–2021; dianalisis bersama Baintelkam Polri

VII. Rencana Tindak Lanjut

1. PKS disusun dengan orientasi implementasi: perbaikan tata kelola dan pencegahan penyelewengan
2. Pembentukan Tim Pokja gabungan untuk sinkronisasi awal dalam minggu ini
3. Siapkan dan sampaikan data kasus penyelewengan perkabupaten/daerah rawan untuk dianalisis Baintelkam Polri
4. Pihak eksternal (Pupuk Indonesia, Sucofindo) diundang setelah draft PKS siap.
5. Target finalisasi PKS maksimal 2 bulan

Lampiran Foto

